



KLIPING DIGITAL

TEMA: PERPUSTAKAAN, PALEMBANG, ISLAM, DAN MELAYU

01 - 10 FEBRUARI 2023

**PERPUSTAKAAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

daftar isi

- ISLAM DAN KEPEMILIKAN HARTA BAGI PEREMPUAN
- KENAIKAN BIAYA HAJI SEBAIKNYA BERTAHAP
- LITERASI DIGITAL DONGKRAK DAYA BERPIKIR KRITIS
- PESONA PULAU KEMARO SAAT CAP GO MEH
- SULTAN PENJAGA WARISAN BUDAYA PALEMBANG
- SULTAN ISKANDAR TAGIH JANJI KERATON KESULTANAN PALEMBANG
- NU DAN PENDIDIKAN ISLAM "WASATHIYAH"
- TINGGALKAN KHILAFAH, SEJAHTERAKAN UMAT
- PILAR KEMANDIRIAN MUHAMMADIYAH
- MASA HAJI 30 HARI HEMAT RP1,2 TRILIUN
- KONTROVERSI BIAYA HAJI
- LITERASI SISWA DITINGKATKAN

Islam dan Kepemilikan Harta bagi Perempuan

PENGANTAR

MULA 1 Maret 2023, ribuan di halaman Qiyam yang telah selesai Rabu malam ini untuk acara Mula Indonesia dan Peringatan Pesta Muhammadiyah, yang merupakan salah satu kegiatan tahunan terbesar Muhammadiyah dengan berbagai acara keislaman dan kebhinekaan. Peringatan Muhammadiyah yang dibarengi dengan Kajian, Wacana, dan Tahlil berlangsung 1912 merupakan gerakan Islam, global serta multi-rahmat, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan akan terus berlanjut. Salah satu momen yang akan menjadi bagian dari perayaan ini adalah penutupan Mula Indonesia dengan tema, menanti pertemuan baru saat ini, dan penemuan masyarakat yang baik.



Al-Fatihah Nur Fadl
 Dosen Kajian Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof Dr Yakub Kanjoran
 Pengurus Majelis Dik PP Muhammadiyah
 Pengurus Majelis NAWA MUI Padang

ARTA laki-laki dan perempuan, mengapa memiliki gender yang sama, bagaimana yang sama, mengapa yang sama, dan bagaimana yang sama, laki-laki dan perempuan, mengapa demikian? Berkaitan hal ini, tentu saja menimbulkan pertanyaan dalam kepemilikan harta? Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

bagian dari budaya patriarki. Kondisi ini menunjukkan mengapa perempuan memiliki akses yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Islam dan harta perempuan
 Islam-generasi Islam, perempuan diberikan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja di luar rumah, mendapatkan gaji yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?



Ilustrasi: Nur Hafidza

mengetahui mahar dan suaminya. Ada juga beberapa budaya lokal yang justru menempatkan perempuan sebagai penerima dan pengelola harta keluarga.

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Dasar berdirinya negara adalah penduduknya. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang adil dan beradab. Oleh karena itu, tentu saja laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam kepemilikan harta. Bagaimana menurut Muhammadiyah?

Kenaikan Biaya Haji Sebaiknya Bertahap

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyarankan agar kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang kini masih dalam tahap pengkajian sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Saya sudah memberi saran kepada Pak Menteri Agama supaya biaya haji kenaikannya dilakukan secara bertahap," katanya di Semarang, kemarin.

Diakuinya, kenaikan biaya haji pada tahun ini memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji, mengingat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayarkan jemaah.

Meski demikian, Menko Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampaui memberatkan jemaah.

Sementara itu, Kepala Divisi Tresuri dan Pengendalian Keuangan BPKH Irwanto menegaskan pihaknya akan mengelola keuangan haji secara *proper* dan berhati-hati. Pada 2021, BPKH menghasilkan nilai manfaat sebesar Rp10,52 triliun dari total dana kelola Rp156 triliun. Pada 2022 nilai manfaat pun masih terjaga di angka Rp10 triliun. (Fal/Ant/H-1)

BANJIR INFORMASI

Literasi Digital Dongkrak Daya Berpikir Kritis

JAKARTA, COMPAS – Kemajuan teknologi tidak hanya bisa membangkitkan informasi di era berjejaring ini. Penguatan literasi digital diharapkan mendorong daya berpikir publik agar tak mudah terlanjur informasi hoaks.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, sebanyak 62,1 persen populasi Indonesia telah mengakses internet. Tingginya pengguna internet ini tidak terlepas dari pesatnya persaingan layanan seluler. Sebanyak 90,54 persen rumah tangga memiliki minimal satu nomor telepon seluler.

Direktor Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abarji Pangrason mengatakan, peningkatan literasi di ruang digital, termasuk mengakses media sosial, perlu dibarengi dengan membangun kesadaran kritis dalam mengonsumsi informasi. "Di era transformasi digital, peningkatan daya pikir lebih menjadi prioritas," ujarnya, di Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kemendikbud telah meluncurkan program literasi digital sejak 2021. Salah satu misinya mengedukasi masyarakat untuk meragukan hoaks dan terminer dari pesan-pesan daring. Program ini mencakup empat pilar utama, yaitu kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital.

Pada tahun pertamanya, program ini sudah menjangkau 12,5 juta orang. Literasi digital pada 2022 mencapai sekitar 6 juta orang. "Diharapkan ini akan meningkatkan program literasi digital untuk 5,5 juta orang. Kami akan terus meningkatkan dengan anggaran yang ada," ucapnya.

(Dibawahi ke hlm 15 (g) 1-7)

Menurut Semuel, terdapat tiga kelompok besar pengguna ruang siber. Pertama, tipe browser atau penjelajah. Tipe ini sudah mempunyai dalam mencari informasi penulis atau penyaji berita.

Kelompok kedua adalah tipe pengguna medsos yang sangat bergantung pada pertemanan. Jadi, di antara mereka bisa saling mengoreksi informasi, dan itu positif.

Sementara kelompok ketiga merupakan tipe penerima informasi satu arah. Jadi, tipe ini tidak mempunyai informasi alternatif untuk dibandingkan.

Program literasi digital akan ditekankan pada pilar keamanan digital. Sebab, di antara tiga pilar lainnya, keamanan digital meraih poin terendah, yaitu

(Sumbangan dari halaman 1)

Indeks Literasi Digital Nasional pada 2022 mencapai 3,54 poin atau meningkat 0,05 poin dibandingkan dengan 2021. Survei melibatkan 10.000 responden pengguna internet berusia 13-70 tahun di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

Saat pertama kali diluncurkan pada 2020, indeksnya sebesar 3,46 poin. Kemudian meningkat menjadi 3,49 pada 2021 dan 3,54 poin pada 2022.

Menurut survei itu, 72,6 persen responden menyatakan terbiasa mendapatkan sumber informasi dari medsos. Medsos juga menjadi sumber berita paling dipercaya kedua setelah media televisi.

Akan tetapi, verifikasi terhadap informasi politik diprediksi meningkat. Sementara kecakapan digital 3,52 poin, etika digital 3,68 poin, dan budaya digital 3,84 poin.

Industri Hoaks

Ketua Umum Siberkreasi Donny Budi Utoyo mengatakan, penyebaran hoaks telah menjadi industri di Indonesia dan banyak negara. "Ada orang yang menggokosi untuk memproduksi hoaks. Yang perlu dilakukan ialah membuat orang-orang kebal hoaks. Hal ini harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.

Isu hoaks cenderung mengikuti tren di masyarakat. Dua tahun terakhir, misalnya, isu hoaks didominasi oleh tema Covid-19 dan vaksinasi. Menjelang pemilu serentak 2024, ho-

dap informasi yang diakses masih rendah. Sebesar 52,2 persen responden mengaku tidak mengecek informasi yang mereka terima, baik berupa berita, gambar, video, maupun unggahan di medsos.

Pada, memverifikasi informasi ke sumber kredibel sangat penting untuk memastikan kebenarannya. "Sederhananya, jika ada informasi besar atau penting, tidak mungkin terlewatkan oleh media massa terpercaya," ujar Semuel.

Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022 juga menyebutkan, 55,9 persen responden sering menemui hoaks di medsos Facebook. Setelah itu disusul berita daring 16 persen, WhatsApp 13,9 persen, dan Youtube 13,1 persen.

aks isu politik diprediksi meningkat.

"Berdasarkan survei Literasi Digital Nasional) medsos menjadi sumber berita paling dipercaya setelah televisi. Padahal, medsos kan tempat pertempuran yang positif dan negatif. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) besar. *Kebayang* ngerinya pada 2023 dan 2024," jelasnya.

Oleh sebab itu, literasi digital masih menghadapi berbagai tantangan. Platform global juga punya peran penting dan tanggung jawab dalam mendukung masyarakat. "Selama ini sudah dilakukan edukasi bersama-sama. Bagaimana berkolaborasi membangun pemiliran kritis masyarakat di ruang digital," ucapnya. (TAM)

PESONA PULAU KEMARO SAAT CAP GO MEH

PERAYAAN Cap Go Meh di Palembang identik dengan keramaian di Pulau Kemaro. Di daratan yang terletak di tengah Sungai Musi ini berdiri sebuah pagoda sembilan tingkat.

PADA malam Cap Go Meh, keramaian di Pulau Kemaro terlihat meriah dengan berbagai kegiatan. Acara ini sebagai ajang perayaan, sekaligus sebagai ajang kompetisi bagi para peserta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 24-26 Februari 2023. Di malam perayaan Cap Go Meh, warga Palembang

melakukan ritual seperti memukul gong, menyalakan lilin, dan berdoa. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi seluruh warga Palembang. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang kompetisi bagi para peserta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 24-26 Februari 2023. Di malam perayaan Cap Go Meh, warga Palembang

melakukan ritual seperti memukul gong, menyalakan lilin, dan berdoa. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi seluruh warga Palembang. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang kompetisi bagi para peserta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu pada tanggal 24-26 Februari 2023. Di malam perayaan Cap Go Meh, warga Palembang



Lokasi

Pulau Kemaro terletak di tengah-tengah sungai dari pusat kota Palembang, dan berada di tengah-tengah Sungai Musi. Jika pengunjung hendak mengunjungi lokasi ini, mereka harus menyebrang ke pulau ini dengan menggunakan perahu atau bus kecil. Lokasi ini sangat indah, dengan pemandangan yang menakutkan.



Akses & Biaya

Untuk ke Pulau Kemaro dapat melalui perahu atau bus. Biaya perahu sekitar Rp 20.000,00 dan bus sekitar Rp 10.000,00. Biaya parkir di lokasi sekitar Rp 5.000,00. Biaya tiket masuk ke lokasi sekitar Rp 5.000,00. Biaya tiket masuk ke lokasi sekitar Rp 5.000,00.

Untuk ke Pulau Kemaro dapat melalui perahu atau bus. Biaya perahu sekitar Rp 20.000,00 dan bus sekitar Rp 10.000,00. Biaya parkir di lokasi sekitar Rp 5.000,00. Biaya tiket masuk ke lokasi sekitar Rp 5.000,00. Biaya tiket masuk ke lokasi sekitar Rp 5.000,00.



Daya Tarik

Daya tarik Pulau Kemaro adalah keindahan alam yang menakutkan bagi wisatawan, yaitu pemandangan sungai Musi yang sangat indah. Selain itu, pagoda sembilan tingkat di lokasi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, pagoda sembilan tingkat di lokasi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.



Sultan Penjaga Warisan Budaya Palembang

MESKI di Kota Palembang memiliki dua sultan, berharap bisa saling memakmurkan dan mengharumkan nama Kota Palembang tanpa ada perselisihan.

RADEN Ayu Tia Rachmawati, pelajar kelas 12 MA Al-Fatih Palembang, berpendapat adanya dua sultan di Palembang memang sudah menjadi pengotahutan umum warga Palembang.

Definisi Kesultanan Palembang Darussalam menurut wanita ini merupakan suatu kerajaan Islam di Indonesia yang bertempat di sekitar kota Palembang.



bang, kerajaan ini diproklamarikan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dari Jawa dan dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823.

"Keduaanya memproklamarikan diri sebagai sultan. Bagaimanapun mereka bersama-sama menjaga nama baik kota Palembang, menjunjung tanah air bangsa serta menjaga keutuhan NKRI," kata Raden Ayu Tia Rachmawati, Sabtu (4/2/2023).

Bagi dirinya kesultanan itu fungsi pentingnya adalah untuk menjaga kebudayaan di Kota Palembang. Menjaga kultur dan budaya Palembang jadi penting terlepas siapapun yang menjadi sultan Palembang.

"Kesultanan Palembang adalah simbol penjaga warisan sejarah dan api sejarah

Palembang," tutur wanita yang merupakan keturunan asli Kota Palembang.

Ta pun kebanggaan kenapa di Kota Palembang iri tidak mempunyai istana kesultanan Kota Palembang, karena memang harus ada istana itu karena merupakan peninggalan sejarah di Kota

Palembang.

"Saya harap semoga Pemerintahan Kota Palembang bisa membangunkan istana kesultanan ini agar masyarakat khususnya Kota Palembang bisa memahami atau tau apa itu dan sejarahnya kesultanan Kota Palembang," tutup Tia. (widya)

Sultan Iskandar Tagih Janji Soal Keraton Kesultanan Palembang

PALEMBANG, SRIPO – Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin mengatakan, rencana Pemkot Palembang yang berencana menanggarkan pembangunan untuk istana Kesultanan Kota Palembang disambut baik pihaknya. Namun, hal itu diharapkan bisa terwujud kedepannya mengingat pada tahun 2011 lalu, meski pihaknya sudah rapat dengan pihak Pemprov untuk membangun kembali Keraton Palembang Darussalam namun nyatanya hingga saat ini belum ada realisasinya.

"Sudah 12 tahun lalu di zaman Gubernur pak Alex Noerdin, pada waktu itu kita rapat dengan Asisten II Pemprov Sumsel Edy Hermanto dengan rencana akan dilakukan pemindahan barak militer di BKB, yang memakan waktu juga, tapi karena ada SEA

Games disetop dahulu," kata Sultan Iskandar, Minggu (8/2).

Disisi lain, pemindahan barak militer di Benteng Kuto Besak (BKB) yang dulunya adalah istana Keraton Kesultanan Palembang memiliki syarat jika hendak dipindahkan dengan tempat yang bisa dikatakan strategis yaitu di Jakabaring saat itu rencananya. Sedangkan untuk RSAK Gani, gubernur sempat mengatakan tidak mungkin memindahkan langsung RS sebelum dibangun RS yang baru sehingga harus disiapkan terlebih dahulu.

Pembahasan Keraton Palembang itu dijelaskan

■ ke halaman 11



DOKUMEN PPSRI
Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin (Sultan Palembang Darussalam).

Sultan Iskandar Tagih Janji Soal Keraton Kesultanan Palembang

■ dari halaman 9

Sultan Iskandar sempat kembali dibahas Alex Noerdin dihadapan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Walikota Palembang Harjojo dan sejumlah pihak lainnya, saat momen Gerhana Matahari pada 2016 lalu di Jembatan Ampela Palembang. Pada kesempatan itu, Alex mengatakan agar Museum BKB diberikan saja untuk Kesultanan Palembang.

"Dan itulah janjinya dan

banyak sakinya termasuk ada Warma pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun nyatanya semua belum ada keselasan," paparnya.

Ditambahkan Sultan Iskandar yang mengklaim Sultan hasil musyawarah mufakat Raja Kesultanan yang ada, beberapa data yang sudah dibincangi dengan Pemprov Sumsel saat itu, hingga sekarang masih lengkap berkasnya, termasuk surat dari Sekda untuk rencana penganggaran untuk pembangunannya.

"Saya rasa secara implementasi janji Pemda kepada kita sudah tidak terpenuhi dalam hal ini, dan pastinya kita minta yang terbaik kepada Allah SWT, karena kalau mau dilibet adanya sesuatu nawaitu atau niat LRT itu bempa triliunan dana untuk membangun, termasuk jalan tol dan mega proyek lainnya. Padahal tidak seberapa kalau untuk mem-

bangun keraton kesultanan Palembang Darussalam, tapi kita tak menampik Palembang merupakan kesultanan terbesar juga wilayahnya di Indonesia," paparnya.

Disisi lain, meski Kesultanan Palembang tidak memiliki Keraton saat ini, dirinya selaku Ketua Umum (Ketum) Yayasan Kesultanan Raja Nusantara yang menghimpun 179 Raja Nusantara, cukup bangga karena Palembang pernah menjadi tuan rumah Keraton Nusantara ke VII pada tahun 2010, dan jelas hal itu ada pengakuan.

"Semua yang ada punya keraton tapi Allah itu mengangkat drajat kita, meski kita tidak ada Keraton tapi kita terpilip sebagai tuan rumah" tandas pria yang juga sebagai Panglima Besar Barisan Adat Nusantara (BaraNusa) pusat dan pendiri Masjid Keraton Nusantara ini. Dilanjut-

kan Iskandar, meski Pemprov Sumsel dalam hal ini Gubernurnya belum bisa memperjuangkan Keraton Kesultanan Palembang kembali ada, pihaknya tetap berharap terus bisa diwujudkan kedepannya.

"Kita sudah memperjuangkan dan surat sudah ada dan lengkap. Kita sudah berupaya bersama gubernur Alex dan kita sudah surat pak Herman Deru juga sebagai Gubernur Sumsel sekarang, dimana surat ke gubernur untuk dilanjuti. Mengingat BKB merupakan kesultanan Pemprov Sumsel dengan kodam II Sriwijaya, apalagi BKB itu milik kita, itu ulayat kita. Tapi kita bangga itu dicatat, bahwa kita tuan rumah pertama Festival Keraton nusantara ke 7 tahun 2010 salah satu kesultanan, yang belum punya Keraton tapi dilaksanakan disini," pungkasnya. (arf/s)

NU dan Pendidikan Islam "Wasathiyah"

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Hidayatullah, Jakarta, dan Pembina LAZISMA dan IWP PC NU Korpeng, Sekeloa

Nabhiatun Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Banyaknya kader menjadikan organisasi ini dipersepsi masyarakat sebagai intelektual penting pengorganisir perubahan manusia lintas sektor.

Pemahaman keagamaan memang menjadi dasar dari pergerakan organisasi ini. Namun, yang perlu diperhatikan pada ialah bagaimana variasi transformasi yang dipaparkan senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.

Hidup dan realisasi organisasi terletak pada pengelolanya. Kader NU menampilkan diri sebagai manusia lengkap yang siap menjangkau tantangan peradaban. Pada masa awal pendiriannya, mereka banyak berkecimpung dalam karya baik berupa perang perjuangan melawan penguasa Belanda dan Jepang. Memasuki Orde Lama, para kader NU menampilkan diri sebagai negarawan.

Bahkan, di era sulit saat Orde Baru berkuasa, para kader NU pun aktif mengisi ruang sosial lewat gerakan prodemokrasi dan lain-lain. Memasuki periode Reformasi, saat kelas demokrasi dibuka, banyak kader NU yang mengisi ruang politik. Keberhasilan Gas Durr memudahi kursi presiden RI adalah salah satu puncak gunung es dari usaha tersebut.

Melihat peran panjang para kader NU di poros nasional, tentunya memang penting mereduksi NU sebagai aktor penting pembuat sejarah Indonesia. Organisasi ini hadir dengan pemikiran yang segar dalam merawat persoalan bangsa, melalui serangkaian kampanye Islam wasathiyah/modernisasi/bengawa, sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya.

Wacana ini menjadi penting sebagai tolak ukur keterbukaan yang memberikan peluang besar untuk menampilkan manusia sebagai pada lintas sektoral, baik antara pendidikan.

Pendidikan "Wasathiyah"

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negeri yang terbuka pada aneka kebudayaan

termasuk gagasan-gagasan transnasional. Publik kekinian tentu sudah sangat leluasa dengan melaksanakannya suatu fenomena yang disebut Islamisme. Wacana ini hadir taklaka Islam dianggap sebagai ideologi sebagai agama, melingkupi gaya hidup. Aneka ajaran Islam mulai dikaji dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dalam penerangan dan pertunjukan, misalnya, ajaran Islam mulai banyak diwacanakan. Tingginya animo masyarakat pada aneka praktik eksistensi Islam menjadi penanda penting eksistensi paham ini di tengah masyarakat.

Mengantarkan peran Islam membuka peluang bagi masyarakat golongan Islam tertinggal. Secara umum, pemahaman mereka lebih alkitab kecerdering-an monolitik saat membaca dan menafsirkan konsep Islam. Misalnya, saat merenungkan Surat Al-Maidah Ayat 44, yang artinya: "Masing-masing yang tidak beriman pada ketentuan yang ditetapkan Allah, maka mereka adalah orang kafir".

Jika ini ditentaskan pada fondasi keagamaan Indonesia yang sama sekali tidak menyepakati Al Quran, negeri ini terkucilkan negeri yang kafir. Nah, pemahaman semacam ini yang perlahan mulai merambat, dan menjadi ancaman bagi stabilitas negara.

Berapakah lain dari mengantarkan fasisme Islam adalah ancaman bagi keberagamaan.

Melihat pada bujukan Al Quran secara langsung (literalist), laura fanatisme Islam memang para pengamal Islam lainnya yang tidak sejalan dengan pemahamannya—teknik salah arah dalam memahaminya agama.

Melihat masyarakat keribahan untuk menentrikkan keseluruhan isi lewat jalan apa pun, termasuk dengan mengambur tuduhan kafir bagi yang tidak menajukannya agama agama secara parah. Di sinilah letak urgensi beragama yang mereka tampilkan, di mana Islam tidak lagi dianggap sebagai suatu keribahan dalam mendefinisikan suatu problem sosial, tetapi cenderung sebagai jalur konfektorial dengan kelompok lain.

Terdapat keyakinan di atas,

harus ada semacam penayarakatan lebih luas dari gerakan Islam wasathiyah yang merupakan wajah lain dari modernisasi beragama. Islam merupakan agama yang sudah matang melintang di lintas peradaban manusia. Keaslian-keagamaan semacam ini dan budaya itu memengaruhi perkembangan peradaban akan hal-hal Islam.

Dalam sektor lain terdapat ungkapan yang menyebutkan bahwa Islam adalah bebaskan bagi setiap manusia dan tempat. Hal ini yang mendasari mengapa paham dan ekspresi keislaman berbeda di satu tempat dan tempat lain. Terdapat nilai lokal yang ikut memengaruhi pemahaman Islam.

Di Indonesia sendiri, penanaman akan Islam cenderung bergam. Pemahaman dan ritual Islam yang ada di Aceh, umpamanya, mempunyai perbedaan dengan yang ditemukan di Jawa atau di tengah rasio Dige di Sulawesi. Ini mencerminkan keragaman memang seragaman kebudayaan masyarakat tempat yang juga berbeda.

Berikut ini secara umum bujukan berawal memudahkan bujukan Islam di bawah sistem nilai dan budaya setempat, melintasi hasil dari pola kromponistik, agar masyarakat lebih memahami dan menggunakan ajaran Islam secara paripurna.

Seyogyanya, pemahaman seperti di atas belum tentu secara luas di tengah masyarakat. Terdapat keanehan intelektual yang dilahirkan isom fanatisme Islam, yang juga banyak mengantarkan aneka platform media sosial untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.

Namun, publik tak perlu merasa mengintip para pendebat NU juga telah siap mengantisipasi gerakan mereka, salah satunya dengan pendidikan Islam wasathiyah yang diwacanakan di berbagai forum, baik langsung di tengah masyarakat maupun di platform digital.

Jika ditentaskan dari masa para kader NU belajar dan menentrikkan pandangan Islam wasathiyah, jawabannya adalah berdasarkan pengalaman hidupnya. Banyak dari kader NU yang berlatar belakang sastra

yang menantati aneka ilmu agama selama puluhan tahun di pesantren. Di sini, mereka banyak melakukan aneka pemahaman Islam secara spesifik berbeda-beda. Bahkan pada rujukan literasi klasik yang ditulis para ulama kenamaan Islam.

Kontinuitas dalam belajar diimbangi dengan pemahaman bermasyarakat melalui serangkaian kegiatan sosial, seperti kerja bakti di lingkungan pesantren, santunan anak yatim, hingga kegiatan pengabdian diri rumah ke rumah penduduk sekitar. Kegiatan ini ikut memperkaya khasanah para santri tentang pentingnya membina masyarakat yang tertata dan berperadaban, jauh dari suasana penyebaran kebencian pada pemahaman beragama masyarakat lainnya.

Penghargaan

Dalam beberapa tahun terakhir, NU menjadi mitra penting Pemerintah RI dalam mewujudkan negara yang berkeadilan dan senantiasa menampilkan Islam yang baik.

Terlebih, dalam forum R23, NU menjadi bintang panggung yang memberikan pemahaman Islam keindonesiaan di hadapan para pemimpin dan tokoh agama dan kepercayaan dari seluruh dunia. Forum ini menjadi penting karena publik global dapat berinteraksi secara langsung dengan ajaran Islam yang dipaparkan melalui pemberitaan dan pemberitaan sejenak media yang menampilkan wajah Islam yang nyata.

Kepercayaan yang diberikan kepada NU tentu bukan datang dengan sendirinya. Pendidikan wasathiyah yang dilaksanakan NU di pesantren dan berbagai lembaga-lembaga pengabdian NU menjadi fondasi penting dalam menentrikkan para kiai, guru, dosen, peneliti, dan aneka profesi lain yang mempunyai komitmen untuk memperkaya keilmuan Islam wasathiyah dan modernisasi beragama di setiap lingkungan sekitarnya.

Di perguruan tinggi agama Islam (PTAI), misalnya, seperti juga yang dilakukan di UIN Sunan Hidayatullah, materi Is-

lam wasathiyah dan moderan beragama telah diperkenalkan kepada mahasiswa. Tidak bisa dimungkiri, kegiatan ini tentu saja yang lebih dulu dilakukan NU.

Akhirnya, publik tentu masih akan menunggu kepastian gagasan yang dianjurkan NU. Setelah sekian lewat penayarakatan sejarah lewat pewartan Islam Nusantara di era Kiai Said Aqil Sirri, maka layak untuk disikatkan bagaimana kepastian gagasan Kiai Yuhus Cholil Sholah menjadi penengah wacana Islam wasathiyah pada kesempatan dan semua yang lebih luas. Melihat pengalaman di bidang pendidikan NU di atas, publik tentu saja optimis terhadap kinerja NU di masa mendatang.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan mempunyai keartikan publik. Artikel harus ditulis ke Guru@Kompas.com. Panjang artikel maksimal 5000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/writer-optical

POJOK

Anak muda didera dilema soal pekerjaan. Tak sesuai minat bukan berarti hambat. Iba

Minyak goreng berbahaya Minyakalki langka. Satu paket dengan komposisi harga.

Festival Cap Go Meh ramai dan meriah. Berhik bernama aneka rupa budaya.

Meng Unti

Tinggalkan Khilafah, Sejahterakan Umat

MUKTAMAR Internasional Fikih I yang berlangsung selama dua hari dalam rangka Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan menolak kehadiran negara khilafah. Menurut mereka, khilafah harus diganti dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Rekomendasi itu dibacakan saat Puncak Resepsi Harlah Satu Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri

atau Gus Mus bersama Yenny Wahid, putri mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kemarin. "Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus diganti dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat," kata Yenny.

Dia mengatakan, cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia tapi berhadapan-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan

dan dijadikan aspirasi. Usaha semacam itu, seperti yang dilakukan ISIS, niscaya akan berakhir pada kekacauan dan berlawanan dengan tujuan pokok agama yang tergambar dalam lima prinsip. "Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta."

Forum muktamar internasional itu pun menyatakan, upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia ialah dengan memperkuat kesejahteraan dan

kemaslahatan umat manusia serta mengakui adanya persaudaraan di antara semua anak cucu Adam.

Gus Mus menyampaikan rekomendasi yang sama dengan Yenny, tapi memakai bahasa Arab untuk para ulama internasional.

Intelektual muda NU yang juga dosen ilmu politik dan *international studies* Universitas Paramadina Jakarta, Ahmad Khoirul Umam, mengharapkan NU dapat terus menjadi jangkar moderatisme Islam

sekaligus pilar perdamaian global dan persatuan nasional. NU juga diharapkan tidak kehilangan daya kritis ketika dekat dengan pihak yang berkuasa.

NU, kata Umam, belakangan menjadi alat stempel dan dinikmati oleh arus politik tertentu. Karena itu, karakter moderat NU perlu diperkuat dengan mengontekstualisasikan Khittah NU 1926 sebagai ormas keislaman yang netral dan independen. (FL/Ind/X-8)

Masa Haji 30 Hari Hemat Rp1,2 Triliun

Usulan Kemenag yang menaikkan biipih dinilai sangat memberatkan calon jemaah haji 1444 H. Pemangkasan besaran elemen dari keseluruhan biaya haji bisa dilakukan segera.

ATALYA PUSPA

atolya@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Agama RI harus menghitung cermat terkait memberangkanya biaya perjalanan ibadah haji (biipih) 2023 hingga mencapai Rp69.193.733,60 karena sangat memberatkan calon jemaah. Komisi VIII DPR mengusulkan agar ibadah haji 1444 H bisa dilaksanakan dalam waktu 30 hari yang akan berdampak baik bagi jemaah dan dapat menghemat sampai Rp1,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII

DPR Marwan Dossopang dalam Rapat Dengar-Pendapat Komisi VIII bersama dengan Kemenag, BPKH dan Garuda Indonesia, di Gedung DPR Senayan, Jakarta kemarin. "Kami menghitung akan terjadi penghematan anggaran sekitar Rp1,2 triliun dan dari APBN gaji peropus bisa hanyir Rp1 triliun kalau bisa kita laksanakan," katanya.

Marwan menilai pelaksanaan ibadah haji yang menelan biaya 40 hari akan membuat jemaah jenuh menunggu beputangan, terlebih lagi jemaah pada kloter awal. Ia merinci, ibadah haji bisa dilakukan 9 hari di Madinah, 6 hari di

hari Tasyrik, dan 15 hari di Mekah.

"Menurut Panja Komisi VIII, peluang ibadah haji 2023 selama 30 hari bisa dilaksanakan jika pemerintah bersungguhsungguh melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, terutama otoritas kebandarawan di Jeddah sehingga pada 2024 tidak perlu ada pembicaraan tentang ini lagi," ucap dia.

Selain itu, dari kunjungan Panja Komisi VIII ke Arab Saudi beberapa waktu lalu, sejumlah rekomendasi dibuat di antaranya akomodasi. Dari kunjungan di sejumlah hotel yang akan ditempati jemaah ditemukan harga satuan yang diajukan pemerintah masih memungkinkan dipangkas harganya.

Di samping itu, Marwan juga melihat bahwa harga konsumsi untuk jemaah masih bisa ditekan dari para vender. Misal dengan meniadakan

mekan pagi. Alasannya, di pagi hari para jemaah lebih cenderung melaksanakan ibadah dan durasinya lebih panjang ketimbang di penginapan.

Berikutnya, biaya transportasi juga bisa dipangkas. Pasalnya, beberapa hotel di Mekah menyediakan bus untuk mengantarkan jemaah dari hotel ke tempat-tempat ibadah.

Pada kesempatan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, memberatkan berdasarkan komunikasi pemerintah Indonesia dengan GACA, bahwa tahun ini operasional haji bagi negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 juta ialah 30 hari.

"Kami juga mendapat informasi bahwa penutupan bandara untuk pesawat carter ialah 4 Zuhrijah. Artinya beberapa hari sebelum 9-10 Zuhrijah dan baru dibuka lagi bandara

untuk pesawat carter pada 15 Zuhrijah," ucap dia. "Untuk kedatangan slot time kami harus disesuaikan dengan maskapai terkait kesediaan armada dan slotnya dengan GACA."

Rampung 14 Februari

Pembahasan untuk keputusan besaran ongkos haji di 2023 harus segera dicumarkan. Untuk itu Komisi VIII DPR menargetkan hal tersebut bisa rampung pada 14 Februari 2023 mendatang.

"Kita minta rasionalkan harga akomodasi, konsumsi dan transportasi. Untuk Masyair, kalau perlu ancaran-mengancan, kita ancam," tegas Marwan. Komisi VIII meminta pemerintah menasionalkan biaya haji 2023 di kisaran Rp50 sampai Rp55 juta.

"Bapak (Dirjen PHU Kemenag) jangan mau diancam. Kalau perlu, kita sekali-kali ancam, kalau gak senaja. Kalau perlu, Indonesia tidak berangkatkan haji tahun ini," tegas dia.

Marwan berharap, pada pembahasan biaya haji selanjutnya, baik DPR maupun pemerintah perlu merinci satu per satu isi komponen pembiayaan, baik yang dibebankan kepada jemaah, maupun yang di APBN. (H-1)

Kontroversi Biaya Haji

Amri Yand

Anggota Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

Pascasarapat kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dengan Komisi VII DPR, 19 Januari 2023. isu soal biaya penyelenggaraan ibadah haji mendasar menjadi polemik dan pertincangan publik. Pro-kontra soal biaya haji menjadi isu panas di media.

Dalam rapat itu, Kementerian Agama mengungkapkan rencana biaya Haji (Bijah) 1448 Rp/2023 dan 20 persen lebih mahal (BPKC) adalah untuk memenuhi prinsip belajar dan keberlanjutan haji dalam jangka panjang.

Formulasi ini muncul setelah melalui proses kajian dan diskusi mendalam, baik di internal Kementerian Agama maupun dengan Badan Pengkaji Keuangan Haji (BPKK).

Selama pembahasan, salah satu hal yang menimbulkan diskusi adalah mengenai besaran komponen yang seharusnya dibebankan dari nilai manfaat (optimalisasi). Menurut Menteri, BPKK 2022 sebesar Rp 14,28 juta dengan komposisi Bijah Rp 13,89 juta (96,5 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) Rp 5,60 juta (39,4 persen). Sementara itu, BPKK 2023 sebesar Rp 14,91 juta dengan komposisi Bijah Rp 14,36 juta (96,3 persen) dan nilai manfaat (optimalisasi) Rp 2,57 juta (17,2 persen).

Argumen Menteri

Salah kekhawatiran yang diungkapkan Menteri Agama adalah soal terdapat nilai yang perlu diambil dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Agama menambahkan bahwa biaya haji yang bernilai manfaat itu akan di-

maksudkan sebagai biaya yang memiliki nilai optimal di tahun politik.

Selain, demi kredibilitas dan keabsahan jemaah haji, diperlukan kebijakan biaya haji yang mampu menahan beban negara dan masyarakat dengan nilai, atau 20 tahun mendatang.

Hal tersebut akan membuat pemerintah lebih siap dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh jemaah haji yang akan datang. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa biaya haji yang akan dikenakan pada tahun berikutnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menurut Menteri Agama, kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

yang berasal dari antara biaya haji resmi 2023/2024 sebesar Rp 14,91 juta plus antara lain Rp 11 juta atau 2023/2024. Untuk memenuhi kebutuhan operasional haji (BPKC), BPKK harus menutupi kebutuhan layanan (financial support) dari nilai manfaat Rp 2,56 triliun atau ekuitas Rp 4,4 juta per anggota jemaah.

Selain itu, manfaat yang akan digunakan BPKK ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Kebijakan yang diambil Menteri Agama ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

yang berasal dari antara biaya haji resmi 2023/2024 sebesar Rp 14,91 juta plus antara lain Rp 11 juta atau 2023/2024. Untuk memenuhi kebutuhan operasional haji (BPKC), BPKK harus menutupi kebutuhan layanan (financial support) dari nilai manfaat Rp 2,56 triliun atau ekuitas Rp 4,4 juta per anggota jemaah.

Selain itu, manfaat yang akan digunakan BPKK ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.



BERKAS HAJI

manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

menjadi hal yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

akan untuk membiayai (financial support) jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Program ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.

Menteri Agama menambahkan bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi jemaah haji yang akan datang. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya yang berkaitan dengan haji.



Guru kelas II, Maria Yulita Mas Ghri, memberikan materi kepada siswa di kelasnya dalam kegiatan belajar mengajar di SD Inpres Wadu di Kelurahan Rega, Bawo, Kabupaten Nagano, Nusa Tenggara Timur, Kamis (9/2/2023). Guru yang mengajar siswa kelas I sampai III di SD Inpres Wadu menngarkan pendekatan bahasa ibu untuk meningkatkan literasi siswa.

Literasi Siswa Ditingkatkan

Siswa kelas awal di daerah terpencil lebih memahami bahasa ibu dibandingkan bahasa Indonesia. Pendekatan transisi bahasa ibu dapat meningkatkan literasi siswa di daerah ini.

NAGANO, KEMAS – Banyak siswa kelas awal, khususnya di daerah terpencil, lebih memahami bahasa ibu dibandingkan bahasa Indonesia. Kondisi ini membuat metode yang digunakan diajarkan bahasa Indonesia tidak terapan secara optimal. Sistem pengajaran dengan pendekatan transisi bahasa ibu dapat meningkatkan literasi siswa di daerah ini.

Salah satu sekolah yang melakukan sistem pengajaran dengan pendekatan transisi bahasa ibu adalah SD Inpres Wadu di Kelurahan Rega, Bawo, Kabupaten Nagano, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sistem pembelajaran dengan pendekatan bahasa ibu untuk siswa kelas I-III ini sudah dilakukan oleh guru SD Inpres Wadu sejak 2021.

Guru kelas IIA SD Inpres Wadu, Yulita Mas Ghri, mengungkapkan, mayoritas siswa yang baru masuk kelas I di NTT termasuk SD Inpres Wadu kurang mengenal dan memahami bahasa Indonesia. Sebab, lingkungan keluarga siswa lebih banyak menggunakan bahasa Nage yang merupakan bahasa ibu mereka, ter-

masuk untuk percobaan sehari-hari. "Sejak pertama kali mengajar tahun 2015, banyak siswa kelas I yang sudah naik kelas masih salah menggunakan huruf. Namun, dengan pendekatan bahasa ibu siswa kelas II sudah mengenal huruf besar maupun kecil," ujarnya saat di temui langsung di Nagano, Kamis (9/2/2023).

Sistem pembelajaran dengan pendekatan transisi bahasa ibu oleh guru SD Inpres Wadu menggunakan strategi yang berbeda-beda untuk setiap kelas. Khusus untuk kelas II, strategi yang diterapkan dengan menggunakan literasi di awal pembelajaran yakni siswa menggambar bahasa ibu. Guru baru beralih menggunakan bahasa Indonesia saat siswa transit ke pembelajaran tertulis atau topik-topik tertentu.

Pengajaran bahasa ibu dalam pembelajaran ini mengacu pada buku *Aliran Baru Kurikulum* 1 hingga 12 dan buku *berpikir tingkat* yang disusun Yayasan Salimma. Buku ini menjadi pedoman dan digunakan oleh guru sejak

siswa duduk di kelas I sampai III.

Dalam implementasinya, setiap guru menggunakan siswa sesuai kemampuan penguasaan bahasa Indonesia. Guru juga memilih secara periodik guru mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Indonesia, termasuk literasi siswa.

"Dari pengajaran bahasa ibu selama 30 menit dan mengaitkan buku itu membuat anak-anak senang karena melihat gambar dan tulisan pendek. Mereka bahkan sempat aktif dan bisa menceritakan materi dengan bahasa daerah, Inggris, dan membaca sendiri," kata Yulita.

Sistem pembelajaran dengan pendekatan transisi bahasa ibu oleh guru SD Inpres Wadu ini merupakan program kolaborasi yang melibatkan, antara lain, Pemerintah Kabupaten Nagano dan program *Transisi untuk Anak Sekolah Indonesia* yang merupakan program kolaborasi antara pemerintah Australia dengan Indonesia. Dalam implementasi teknisnya, program ini didukung Yayasan Salimma.

Pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kurikulum juga terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jangung Pendidikan Dasar, dan Jangung Pendidikan Menengah. Ketentuan ini menekankan bahwa guru dapat melibatin penelitian dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia ketika anak sudah siap.

Persentase kelulusan

Dipaparkan Direktur Learning Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia Fery Setiwa mengatakan, hasil laporan pendekatan transisi bahasa ibu di Sumba Timur, NTT, pada 2019-2019 menunjukkan, program ini berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa lebih signifikan.

Laporan tersebut mencatat, kelulusan ke literasi dasar siswa kelas I-III yang mencapai pembelajaran dengan transisi bahasa ibu ke bahasa Indonesia sebesar 53 persen. Sementara kelulusan siswa yang hanya

mendapat pembelajaran dengan bahasa Indonesia 43 persen.

Melihat demikian, Fery menekankan, program ini bukan pembelajaran keagamaan menggunakan bahasa daerah. Namun, program ini merupakan upaya memperbaiki siswa agar dapat meningkatkan kemampuan literasi.

"Pembelajaran untuk siswa kelas awal akan lebih efektif dengan menggunakan bahasa yang mereka kuasai dulu, bahasa ibu digunakan untuk media dan mengembangkan keterampilan komunikasi serta kepercayaan diri mereka," ungkapnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nurul Emyuni menyatakan, program pendekatan transisi bahasa ibu selaras dengan kebijakan nasional, khususnya penguatan literasi. Kebijakan pemerintah daerah juga sangat penting agar program ini dapat dilaksanakan di wilayah lain.

"Kewaskudristek sangat mendukung semua program intervensi yang dilakukan mitra," ungkapnya. (NTT)



**UNTUK MENCARI KLIPING
LAINNYA DAPAT MENKSES
LINK BERIKUT**



bit.ly/KLIPING-DIGITAL-UIN-RF



atau scan di sini



KLIPING DIGITAL PERPUSTAKAAN UIN RF

**Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
2023**